

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam merupakan agama rahmatan lil'alamini yang mempunyai aturan yang baik yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan peraturan yang ada di dalam agama Islam adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya mengatur tentang pembagian harta pustaka. Aturan yang berkaitan dengan pembagian harta pustaka yang dimaksudkan disini dikenal dengan hukum kewarisan islam.¹

Di Indonesia setidaknya ada tiga sistem yang berlaku dalam hal pembagian harta waris yaitu, kewarisan individual yang bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam system pembagian patrilineal, matrilineal ataupun parental. Maka tidak menutup kemungkinan jika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup untuk memperoleh hak waris tersebut.² Bahkan jika tidak ada wasiat apapun dari pewaris, maka harta peninggalan dibagi-bagi antara para pewaris.

Hal ini sesuai dengan bab kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 188.

¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm.2.

² Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm. 7

“Para ahli waris baik secara bersama- sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugutan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.³

Waris adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *warisa,yarisu,irsan,fahuwa warisun* yang artinya orang yang menerima waris.Kata-kata ini berasal dari kata *warisa* yang artinya perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka⁴.

Dalam Islam, hal pembagian warisan telah diatur dengan jelas dalam kitab Fiqh Mawaris yaitu pengetahuan yang mempelajari orang” yang berstatus sebagai ahli waris dengan meninggalnya seseorang. Orang yang tidak berhak sebagai ahli waris,orang yang ditutup hak kewarisannya dan hak kewarisan masing-masing ahli waris dan tata cara pelaksanaan pembagaian kewarisan.⁵

Sedangkan dalam KHI bahwa kewarisan di artikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶

³ Tim redaksi Nuansa Aulia,*Kompilasi Hukum Islam*.Nuansa Aulia,Bandung,2015,hlm.55

⁴ Hasbiyallah,*Belajar Mudah Ilmu Waris*,Remaja Rosdakarya,Bandung.2007,hlm 1

⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, Gunung Agung,Jakarta, 1993, Cet. 1,hlm.7

⁶ Tim redaksi Nuansa Aulia.*Op.Cit*.hlm.50

Jadi hukum kewarisan ini membicarakan tentang bagaimana peralihan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, lalu kepada siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa jumlah harta yang diberikan.⁷

Semua ini telah ditentukan agar terjadi keadilan diantara mereka yang masih hidup. Hal ini sesuai dengan Q.S.An-Nisa :11.

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing-nya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang is buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu , kamu tidak mengerahui siapa dia antara mereka yang lebih

⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT.al-Ma’arif,Bandung,1975,hlm.36

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸

Bahkan dalam Hadits pun di jelaskan :

“Nabi Muhammad SAW bersabda: Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (ashobah).” (HR. Bukhori Muslim).⁹

Dilihat dari Ayat dan Hadits diatas dapat di pahami bahwa aturan yang telah di tetapkan allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadits jelas bahwa ada hak yang dimiliki masing-masing ahli waris dengan alasan yang telah di tetapkan. Alasan yang menetapkan bahwa laki-laki mendapatkan hak waris dua kali dari perempuan ini adalah karena laki-laki membutuhkan nafkah baginya dan juga bagi istrinya. Juga karena laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi, bekerja dan juga membayar mahar. Sedangkan wanita ia hanya membutuhkan nafkah bagi dirinya sendiri.

Harta pusaka ialah segala sesuatu yang dimiliki mayit sebelum matinya, baik berupa harta yang seutuhnya, hutang, maupun berupa hak harta.

Hal ini berarti hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa saat kematian seseorang yang meninggalkan harta adalah saat yang menjadi penentu beralihnya hak atas harta dari pemiliknya semula itu kepada orang yang lain, suatu hal yang berbeda dengan ketentuan kewarisan menurut versi di luar Islam. Dimana

⁸ Depag RI, *al- Quran Dan Terjemahannya*, Toha Putra, Jakarta, 1989, hlm. 62

⁹ Al Nawawiy, *Syarah Shoheh Muslim*, Matba'ah al- Misriyah, Cairo, 1971, hlm. 114

kewarisan adat hanya meneruskan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi pada generasi.

Ter Haar mengemukakan bahwa pada hukum kewarisan adat pada saat kematian terabaikan karena yang dipentingkan adalah peralihan kepada generasi, baik semasa pemilik masih hidup atau sebab peraturan karena pemiliknya meninggal lalu beralih.

Hal ini berarti dalam hukum adat bahwa harta benda keluarga mula-mula disediakan sebagai dasar penghidupan material keluarga dan keturunannya dapat dinyatakan oleh adanya peraturan pengganti waris, bahkan jika orang luar sudah dianggap menjadi anak, maka ia mempunyai hak waris dengan penuh.¹⁰

Fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan kewarisan Islam dengan cara menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan yang bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Padahal Allah telah mengancam orang-orang yang berbuat seperti ini. Berdasarkan Q.S. An-Nisa :14.

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan”¹¹

Namun pada kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Padahal salah satu prinsip

¹⁰ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, 1996, ,hlm. 167

¹¹ Depag RI, Op. Cit. hlm. 63

dalam kewarisan Islam ialah ijbari, dimana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.¹² Hal ini menimbulkan akibat baik dari bagian yang diterima bahkan dikemudian hari secara langsung akan terjadinya konflik antar keluarga yang menunda pembagian harta warisan. Hal tersebut menjadi permasalahan karena Allah telah menetapkan suatu hukum berdasarkan suatu kemasalahatan, apalagi Al-Qur'an telah menjelaskan betapa pentingnya pelaksanaan kewarisan. Hal ini dilakukan karena pusaka ini suatu wasilah yang paling besar penting dalam memiliki harta dan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain.¹³

Hal inilah yang belum terealisasi oleh sebagian masyarakat di Desa Serang Mekar Kecamatan Ciparay. Desa Serang Mekar merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Ciparay. Penduduk Desa Serangmekar ini kebanyakan memiliki masyarakat yang heterogen, dimana daerah ini rata-rata adalah masyarakat pendatang yang datang dari berbagai daerah. Dengan berbedanya ini menyebabkan berbeda-beda tentang tata cara pelaksanaan apapun salah satunya mengenai masalah pembagian harta waris.

Menurut salah seorang warga bahwa pelaksanaan pembagian harta waris di daerah ini terkadang menggunakan hukum islam atau dengan menggunakan kewarisan menurut adat. Selain itu, sebagian mereka membagi harta waris itu dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sewaktu pewaris masih

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 17

¹³ Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 19

hidup atau pewaris sebelumnya berwasiat kepada salah satu ahli waris dengan alasan untuk menjaga ketentraman di masa yang akan datang setelah pewaris meninggal dunia. Dan ada juga diantara mereka membagi harta warisan ini dengan sama rata berdasarkan kesepakatan diantara para ahli waris.

Hal ini dikarenakan bahwa mereka menganggap ketentuan pembagian harta warisan (hukum yang ada dalam teks Al-Qur'an dan Hadits) tersebut bersifat sebagai "hukum yang mengatur", dan oleh karena itu dapat di kesampingkan apabila para ahli waris menghendaki lain.

Padahal ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits bersifat memaksa, dan karenanya wajib pulalah bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya.

Selain itu salah satu asas kewarisan Islam adalah asas kemutlakan (kepastian), yakni peralihan harta dan hak seseorang yang sudah wafat kepada ahli warisnya yang masih hidup di luar kehendak diri sendiri karena sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an.¹⁴

Jika hal diatas dihubungkan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa keluarga yang melakukan penundaan pembagian harta waris di Desa Serang Mekar Kecamatan Ciparay tersebut. Apabila salah seorang dari orang tua mereka meninggal, maka para keluarga hanya terfokus pada acara adat istiadat seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari untuk mendoakan orang tua mereka yang meninggal (pewaris), setelah itu mereka sibuk dengan kegiatan

¹⁴ Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Qur'an*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 80

mereka masing-masing. Mereka lupa terhadap suatu kewajiban yang lain yakni pelaksanaan hukum kewarisan yang semestinya harus dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Yang apabila tidak dilaksanakan, nantinya dikhawatirkan akan memberikan kemadhorotan dikemudian hari.

Salah satu kasus yang terjadi akibat tidak dilaksanakan kewarisan adalah pada keluarga pak Endang, ketika pak Endang sebagai pewaris (ayah dari para ahli waris) meninggal, maka semua keluarga terfokus pada penyelenggaraan jenazah dan persiapan acara istiadat seperti tujuh hari dan empat puluh hari, tanpa terpikirkan akan akibatnya karena semua ahli waris telah mempunyai pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Mereka berfikir bahwa harta ini masih kepunyaan ibu mereka (isteri pewaris) sehingga harta waris tersebut dipakai untuk membiayai nafkah ibu mereka, serta biaya orang atau ahli waris yang mengurusinya tanpa terlebih dahulu membagi harta tersebut dengan hukum kewarisan Islam. mereka setuju bahwa harta warisan dapat digunakan oleh ahli waris yang mengurus ibu mereka dimana harta tersebut sekedar untuk menafkahi ibu mereka. Akan tetapi kecurigaan para ahli waris mulai timbul, dimana harta tersebut bukan hanya digunakan untuk menafkahi ibu mereka, Tetapi harta tersebut juga dipakai oleh ahli waris yang mengurus ibu mereka untuk menafkahi keluarganya.

Akibat dari kasus yang terjadi dari permasalahan diatas adalah pemukulan yang dilakukan oleh anak dari salah seorang ahli waris yang bernama Jajang

kepada bibinya yang bernama Imas (ahli waris). Sehingga membuat hubungan kekeluargaan mereka menjadi kacau.¹⁵

Begitu juga yang dialami oleh keluarga Pak Engkus. Sejak kematian istrinya yang pertama, pelaksanaan kewarisan pun juga tidak dilaksanakan sampai ia beristeri kembali untuk yang kedua kalinya, hal ini dilandasi oleh sikap yang masih menganggap bahwa harta itu adalah harta pribadinya tanpa ada pembagian harta bersama. Fenomena yang terjadi ialah bahwa anak- anaknya (ahli waris) dari isteri pertamanya (pewaris) merasa bahwa harta ibunya dimakan oleh isteri ayah (ibu tiri) mereka.

Fenomena yang timbul ialah terjadinya perselisihan diantara mereka, terjadinya keributan dalam rumah akibat ketidakjelasan mana harta ayah dan mana harta ibu. Mereka takut bahwa harta ibu mereka nantinya akan diwariskan juga kepada ibu tiri mereka apabila ayah mereka meninggal sedangkan harta waris ibu mereka tersebut belum dibagi.¹⁶

Dengan demikian apabila ditinjau dari sisi dua keluarga yang melaksanakan penundaan pembagian harta waris tanpa memperhatikan aturan sesuai dengan ajaran Islam dalam pelaksanaan pembagiannya. Berdasarkan menjadi latar belakang penulis, penulis tertarik mengetahui lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN**

¹⁵ Wawancara sementara yang peneliti lakukan pada hari Rabu, 8 Januari 2020 pukul 11.00 WIB. Di Rumah Pa Endang Desa Serang Mekar Kecamatan Ciparay.

¹⁶ Wawancara sementara yang peneliti lakukan pada hari Jum'at. 10 Januari 2020 pukul 14.00 WIB. Di Rumah Pa Engkus Desa Serang Mekar Kecamatan Ciparay.

INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,penulis merumuskan beberapa masalah :

1. Bagaimana pengaturan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan ?
2. Bagaimana praktik pembagian harta warisan di desa Serangmekar tersebut ?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan terhadap penundaan pembagian harta warisan di desa Serangmekar ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan ketiga pokok permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Mengetahui dan mengkaji pengaturan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan
2. Mengetahui dan mengkaji praktik pembagian harta warisan di desa Serangmekar
3. Mengetahui dan mengkaji solusi yang dilakukan terhadap penundaan pembagian harta warisan di desa Serangmekar

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sekaligus memperluas wawasan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam

pembagian harta warisan dan sebagai bahan masukan sekaligus referensi serta pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dibidang yang serupa secara lebih mendalam.

2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis serta meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum khususnya dalam pembagian harta waris tersebut dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum dan dapat memberikan ilmu terkait dengan pembagian hukum waris.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum, hukum adalah perangkat asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur antara manusia dengan masyarakat. Hukum terbagi dalam beberapa macam salah satunya tentang kewarisan.

Kata Waris adalah bentuk isim *fa'il* dari kata *warisa*, *yarisu*, *irsan*, *fahuwa warisun* yang artinya orang yang menerima waris. Kata-kata ini berasal dari kata *warisa* yang artinya perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.¹⁷

Walaupun cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada pokoknya mereka berpendapat sama yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris.¹⁸

Adapun harta waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut

¹⁷ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm 1

¹⁸ Hasbiyallah. *Ibid*. hlm 10

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai kepada meninggal dunia.¹⁹

Sejumlah ketentuan tentang kewarisan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, yaitu :

1. Q.S An-Nisa :7

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Dalam ayat ini secara tegas Allah SWT menyebutkan bahwa laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

2. Q.S An-Nisa :11

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),

¹⁹ Tim redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit.* hlm.50

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak,ibu dan bapak,disamping itu juga diatur tentang wasiat dan pewaris.

3. Q.S An-Nisa :12

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua

jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Dalam ayat ini juga ditentukan bagian-bagian yang harus didapatkan termasuk janda atau duda.

4. Q.S An-Nisa :33

”Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Dalam ayat ini secara tegas Allah SWT menjelaskan bahwa apabila sudah tau bagiannya maka segeralah untuk di bagikan.

5. Q.S An-Nisa :176

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Terdapat pula dalam Hadits yang mengatur tentang pembagian ahli waris,yaitu :

“Telah menceritakan Abdul a‘la Bin Hammad yaitu An-Narsi. Telah menceritakan Wuhaib dari Ibn Thowus, dari bapaknyan dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Muslim No. 1615)”.

Sejumlah ketentuan lain diatur di dalam ijma dan ijtihad Para Sahabat,Imam Madzhab dan Para Mujtahid lainnya.²⁰

Adapun syarat dalam penetapan dan pembagian waris baru bisa dilaksanakan bila memenuhi syarat sebagai berikut :

²⁰ Otje Salman, Mustofa, *Hukum Waris Islam*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm 3

1. Adanya yang wafat. Tidak berlaku hukum waris bila pemilik harta itu belum wafat, yang dimaksud dengan wafat *muwaris* disini, terdiri dari wafat *hakiki* dan wafat *hukmi*. Wafat *hakiki* ialah orang yang punya harta telah diketahui wafat secara jelas. Sedangkan wafat secara *hukmi* ialah orang yang hilang yang tidak diketahui keberadaannya, tidak ada berita. Kemudian dicari juga tidak ditemukan, melalui proses hukum dan berdasarkan penetapan pengadilan dinyatakan mati secara hukum.
2. Ahli warisnya masih hidup ketika muwaris wafat. Orang yang meninggal lebih dulu daripada yang meninggalkan harta itu tidak ada hak untuk mendapatkan warisan.
3. Benar-benar dapat diketahui adanya hubungan pewarisan yang buktinya bisa dipertanggungjawabkan baik tertulis, administrasi, atau adanya saksi dan pengakuan dari ahli waris lainnya. Ini merupakan suatu penegasan yang diperlukan terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.
4. Tidak terdapatnya penghalang waris. Penghalang waris yakni berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris.
5. Membunuh. Hadits nabi yang mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya. Percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang warisan.

6. Menjadi budak orang lain. Budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karena itu ia tidak berhak mendapat harta waris.²¹

Ada peraturan bahwa tidak sembarangan orang mendapatkan harta warisan diantaranya yang menerima warisan adalah :

1. Hubungan kekerabatan atau nasab, hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak perempuan itu berhak mendapatkan warisan.
2. Hubungan pernikahan, hubungan pernikahan terjadi jika akad telah dilakukan secara sah antara suami dan istri. Meskipun diantara mereka keduanya belum melakukan hubungan intim, hak pewaris tetap berlaku.
3. Wala', wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia maka orang yang memerdekakan berhak mendapat warisan.²²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c sebab-sebab mendapatkan waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain orang yang berhak menerima harta waris ada juga orang yang tidak berhak untuk mendapatkan harta waris diantaranya :

1. Perbudakan

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press Yogyakarta : Yogyakarta, 2009, hlm 20

²² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawarits*, CV Pustaka Setia. Bandung, hlm 24-25

2. Pembunuhan
3. Perbedaan Agama

Adapun seseorang terhalang menjadi ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 :

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²³

Hukum Kewarisan Islam mengandung beberapa asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri. Asas Kewarisan Islam tersebut antara lain :

1. Asas Ijbari

Yakni, pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukkan pemindahan tersebut. Antara waris dan ahli waris dalam hal ini “dipaksa” (ijbar) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada. Apabila dalam prakteknya, ada seorang ahli waris yang

²³ Otje Salman, Mustofa, *Op. Cit.* hlm. 163

merasa lebih cukup daripada pewaris, sehingga merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut, maka dia tetap berkewajiban menerima harta itu, adapun harta tersebut akan disumbangkan atau keperluan yang lain terserah kepada yang menerima harta tersebut. Hal yang pokok adalah setelah semua itu diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan ikrar yang jelas. Asas ini berlaku hanya jika pewaris sudah meninggal dunia.²⁴

2. Asas Bilateral-individual

Terma Bilateral sebagaimana yang disebutkan oleh Hazairin kalau dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ini dan bapak. Konsep Bilateral bila dihubungkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan.

Pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif. Dengan demikian yang dimaksud dengan bilateral individual adalah asas bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsinya. Asas ini diketahui dari pengertian tersebut dalam nash pada kelompok ayat kewarisan (Q.S An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176). Inti pengertian ayat

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, UII Press : Yogyakarta, 2010, hlm 34

tersebut adalah penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi dari pihak ayah atau ibu dengan bagian tertentu.²⁵

3. Asas kewarisan akibat kematian

Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dan pewaris kepada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Perpindahan harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekalipun kepada ahli warisnya, baik secara langsung atau terlaksana setelah pewaris meninggal dunia. Menurut hukum Islam tidaklah disebut pewarisan, tapi mungkin hibah atau jual beli atau dengan yang lainnya. Asas kewarisan akibat kematian dapat dikaji dari penggunaan kata *warasa* dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta warisan tersebut meninggal dunia. Atas dasar ini hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata yang dalam hukum BW disebut kewarisan *ab intestato*.²⁶

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.* hlm 35

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam : Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 49

diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya.²⁷

5. Asas Pembagian

Perbedaan antara ahli waris terletak pada porsi bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perbedaan beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga yaitu laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada perempuan, sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak untuk mengurus perempuan. Disamping itu laki-laki juga mempunyai kewajiban ganda yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan kewajiban terhadap keluarganya. Sedangkan anak mendapat bagian lebih banyak daripada orangtua, sebab anak memikul kewajiban sebagai pelanjut orang tua untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita dan eksistensi keluarga.

6. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi.

Adapun prinsip hukum kewarisan Islam yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan

²⁷ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 27

wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis/kapitalis dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perseorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan. Prinsip ini menentukan bahwa pewaris diberi hak memindahkan harta peninggalannya kepada orang yang diinginkan dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.

2. Kewarisan merupakan ketentuan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukareka atau atas putusan pengadilan, tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pewarisnya.
3. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarganya, dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah.
4. Hukum kewarisan Islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat dengan menemukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
5. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan. Namun, besar

kecilnya bagian harta yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan berkeluarga.

6. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Pada bagian-bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Ketentuan tersebut bersifat tetap karena diperoleh dari Al-Qur'an dan bersifat kekal yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada, melekatkan nilai keagamaan pada hukum kewarisan itu. Atas dasar adanya ketentuan bagian tertentu bagi ahli waris dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam bersifat individual.²⁸

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh

²⁸ ASM Saifuddin, *Mukhtasar Ilmu Waris*, CV. Musyarrafah: Bandung, 2004, hlm 12

gambaran yang menyeluruh²⁹ yaitu tentang Tinjauan Yuridis Penundaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analisis, karena merujuk pada pendapat Soejono Soekanto yaitu :

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.³⁰

2. Metode Pendekatan

Pada penulisan ini penulis melakukan pendekatan secara *yuridis empiris*, pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*. Karena penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.³¹

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta Cetakan III, 1986, hlm 31

³⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 119

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: GHALIA Indonesia, hlm 93.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi

a. Penelitian kepustakaan (Library Reseach)

Menurut Ronny Hanitjo soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

“Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti batang tubuh, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang memiliki korelasi dengan penulisan skripsi ini seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diantaranya Kamus Hukum dan bahan dari internet.³²

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah pengumpulan data dari bahan-bahan yang diperlukan melalui penelitian lapangan, dengan cara memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder serta untuk melengkapi penelitian kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis.³³ Penulisan melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya, dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis, dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal, dan data resmi mengenai masalah yang akan diteliti.

³² Ronny Hanitijo Soemitro. *Ibid.* hlm.95

³³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.98

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah peneliti kepada seorang responden.³⁴

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian di rekam melalui alat perekam suara seperti handphone atau tape recorder.

6. Analisis Data

Analisis menurut Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, yaitu :

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.82.

“Analisis yang di anggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto. Analisis dapat di rumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁶

Sesuai dengan metode yang di terapkan, maka data yang di peroleh untuk keperluan penelitian ini, di analisis secara Yuridis-Kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang di nyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.³⁷

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang terbilang jauh dari kota bahkan bisa di sebut dengan kota terpencil dan memiliki korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

³⁵ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 30.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid* . hlm. 98

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,Jl.Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,Jl.Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan dan kearsipan kota Bandung,Jl.Seram,No.2,Citarum, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Tempat Penelitian yaitu di Desa Serangmekar Kecamatan Ciparay.

